

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1024/ITJ.0/RC.610/VII/2026

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode Triwulan II Tahun 2026 yang disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Kinerjaku.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,11** dengan kategori "**Istimewa**". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen internal telah berjalan secara efektif dalam mendukung tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pengukuran, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja disajikan dalam laporan terlampir sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Inspektur Jenderal dalam memberikan arahan dan pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja pengawasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

Lampiran

Nomor : 1024/ITJ.0/RC.610/VII/2026

Tanggal : 20 Juli 2026

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

Sebagai unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan agar sesuai dengan rencana dan tujuan, serta sejalan dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, Itjen KKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara profesional dan berkualitas. Untuk itu, diperlukan manajemen pengawasan yang efektif serta fungsi-fungsi manajemen lainnya guna memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Itjen. Dalam hal ini, dukungan atas manajemen pengawasan tersebut menjadi fungsi yang dijalankan oleh unit Kesekretariatan Itjen, yang meliputi antara lain koordinasi program pengawasan tahunan, pengelolaan data hasil pengawasan, penyusunan peraturan/pedoman tata organisasi, dan penyiapan sumber daya pengawasan. Dari uraian tersebut, dapat digambarkan bahwa peran Sekretariat dalam memberikan dukungan manajemen pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan intern yang dijalankan oleh Itjen KKP.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Itjen KKP, tugas dan fungsi kesekretariatan dilaksanakan secara sistematis melalui manajemen kinerja yang terarah, terukur, dan terstruktur. Manajemen kinerja Sekretariat Itjen diawali dengan proses perencanaan melalui identifikasi permasalahan atas pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya, serta identifikasi kebutuhan sumber daya berdasarkan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan. Perencanaan kegiatan yang telah disusun tersebut kemudian dilaksanakan secara terarah dengan pengendalian berkala guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan agenda dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil atas peran unit Sekretariat Itjen dievaluasi dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan sumber daya pengawasan, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Itjen atas penggunaan sumber daya, yang bertujuan memberikan informasi mengenai berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan melalui evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal merupakan komitmen bersama untuk mencapai target strategis dan operasional demi mendukung visi dan misi Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur bagi Sekretariat Itjen;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Itjen;
3. Menjadi dasar evaluasi kinerja Sekretariat Itjen selama periode 2026; dan
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Penjelasan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi fokus dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal (%)	≤ 0,5
	2.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Inspektorat Jenderal (%)	86
	3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	88,20
	4.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal (Nilai)	92
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal (Nilai)	81,75
	6.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	3,60
	7.	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	85,25
	8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal (Nilai)	79

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
	9.	Persentase Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Inspektorat Jenderal (%)	82
	10.	Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Indeks)	4,06
	11.	Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola lingkup Inspektorat Jenderal (%)	100
	12.	Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal (%)	100
	13.	Persentase Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal KKP (%)	82
	14.	Nilai Pembangunan Integritas lingkup Inspektorat Jenderal (Nilai)	77

Sekretariat Inspektorat Jenderal berkomitmen mencapai target kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, akuntabel, serta didukung pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sebagai dasar pengambilan langkah perbaikan, penyesuaian strategi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan hingga akhir Tahun 2026.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,11** pada Triwulan II Tahun 2026 dengan kategori "**Istimewa**". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berjalan secara optimal, sebagaimana tercermin dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja pendukung Sasaran Kinerja "**Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal yang Akuntabel**" yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa dalam aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kinerjaku), nilai capaian indikator kinerja menerapkan mekanisme pembatasan nilai (*capping*) dengan batas maksimum **120,00%**. Oleh karena itu, apabila

hasil perhitungan capaian suatu indikator melebihi **120,00%**, nilai yang ditampilkan pada aplikasi tetap sebesar **120,00%** sesuai dengan ketentuan sistem. Ketentuan tersebut hanya memengaruhi penyajian nilai capaian pada aplikasi dan tidak mengubah realisasi kinerja aktual yang telah dicapai.

Perkembangan capaian NKO Sekretariat Inspektorat Jenderal pada periode Triwulan I dan II disajikan pada gambar berikut.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, capaian indikator kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026.

2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tentang Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Persentase Jumlah

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Inspektorat Jenderal KKP pada triwulan II tahun 2026 mencapai 100,00%, yang ditunjukkan dengan terselesaikannya 7 dari 7 rekomendasi hasil pengawasan. Realisasi tersebut melampaui target sebesar 86,00%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 116,28%.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target (realisasi kinerja triwulan II tahun 2026 dengan realisasi triwulan II tahun 2025 dan target tahun 2026).

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen KKP	85,00	100	117,65	86,00	100	116,28	100	116,28

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100,00%, sama dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2025. Namun demikian, nilai capaian kinerja mengalami sedikit perubahan dari 117,65% pada Triwulan II Tahun 2025 menjadi 116,28% pada Triwulan II Tahun 2026. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan target kinerja dari 85,00% pada Tahun 2025 menjadi 86,00% pada Tahun 2026.

Meskipun nilai capaian secara persentase mengalami penurunan sebesar 1,37 poin persentase, realisasi kinerja tetap terjaga pada tingkat maksimal, yaitu 100,00%, dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut juga telah memenuhi target Tahun 2026 sebesar 86,00%, dengan nilai capaian sebesar 116,28%.

Dengan realisasi sebesar 100,00%, Inspektorat Jenderal berada pada kelompok unit kerja dengan capaian tertinggi bersama enam unit kerja lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang menjadi objek pengukuran telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan kinerja. Meskipun jumlah rekomendasi yang menjadi objek pengukuran relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa unit kerja lainnya, yaitu sebanyak 7 rekomendasi, keberhasilan menyelesaikan seluruh rekomendasi dengan status tuntas mencerminkan efektivitas pengelolaan tindak lanjut, komitmen unit kerja dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan, serta konsistensi dalam menjaga akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh:

- a. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. optimalisasi proses penginputan data, verifikasi, serta penetapan status tindak lanjut melalui Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK).

3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026.

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1823/SJ.2/RC.210/VII/2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026, realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP periode Triwulan II Tahun 2026 mencapai 99,72 atau **108,39%** dari target 92.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2025			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	88,00	98,67	112,13	92,00	99,27	108,39	99,72	108,39

Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai IKPA Itjen pada triwulan II tahun 2026 lebih tinggi dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran Eselon I Periode Juni 2026, Inspektorat Jenderal menempati peringkat ke-1 dari 10 unit Eselon I dengan capaian sebesar 99,72, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh unit kerja. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan pengendalian rutin dan berkala terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan yang meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas pencapaian hasil pelaksanaan anggaran.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026.

6. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026.

7. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 1209/SJ.3/TU.210/VII/2026 perihal Capaian IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Semester I Tahun 2026 dan Target Capaian IP ASN KKP Semester II Tahun 2026, realisasi nilai Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal pada triwulan II tahun 2026 mencapai 86,23 atau 107,79% dari target 80. Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai nilai 86,23 dengan capaian kinerja sebesar 107,79%, meningkat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 yang mencapai nilai 81,36 dengan capaian sebesar 104,31%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal sebesar 4,87 poin atau sekitar 5,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Tahun 2026 sebesar 85,25, realisasi Semester I Tahun 2026 telah melampaui target dengan capaian sebesar 101,14%,

sehingga menunjukkan bahwa target tahunan telah tercapai sebelum akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran, Inspektorat Jenderal menempati peringkat pertama dengan nilai 86,23, tertinggi di antara seluruh unit Eselon I di lingkungan KKP. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mengelola dan meningkatkan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa upaya, antara lain:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan disiplin pegawai secara berkelanjutan;
- b. peningkatan partisipasi pegawai dalam kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan; dan
- c. optimalisasi pemutakhiran data pengembangan kompetensi melalui aplikasi MyASN, termasuk pengunggahan sertifikat dan dokumen pendukung secara tepat waktu.

8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026.

9. Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026, realisasi indikator kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SiRUP di lingkungan Inspektorat Jenderal mencapai 99,51 dari target 82,00, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 121,35%.

Sesuai dengan mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai capaian indikator dibatasi (*capping*) pada maksimum 120,00%. Oleh karena itu,

meskipun hasil perhitungan aktual mencapai 121,35%, nilai capaian yang ditampilkan pada aplikasi Kinerjaku adalah 120,00%. Kondisi tersebut tidak memengaruhi realisasi indikator, melainkan merupakan ketentuan dalam sistem pengukuran kinerja untuk membatasi nilai capaian yang melebihi batas maksimum.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target (realisasi triwulan II tahun 2026, realisasi triwulan II tahun 2025 dan target tahun 2026) tersaji pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Inspektorat Jenderal	76	100	131,57	82	99,51	121,35	99,51	121,35

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja periode triwulan II tahun 2026 sebesar 99,51 atau mencapai 121,35%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025 sebesar 100 atau 131,57%, capaian pada tahun 2026 tidak mengalami penurunan yang signifikan, sehingga capaian tetap melebihi target. Sedangkan apabila realisasi triwulan II tahun 2026 dibandingkan target akhir tahun 2026 dengan target 82 atau mencapai 121,35%. Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Terumumkan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Jenderal menempati peringkat ke-10 (terakhir) dengan capaian skor IKU sebesar 99,51. Meskipun berada pada peringkat ke-10, capaian Inspektorat Jenderal tetap memenuhi bahkan melampaui target IKU yang ditetapkan. Posisi terakhir bukan menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap pengumuman RUP, melainkan karena terdapat kelebihan pengumuman (over-publishing) sebesar 0,49% dibandingkan nilai pagu pengadaan yang seharusnya diumumkan. Oleh karena itu, pada periode berikutnya Inspektorat Jenderal perlu memastikan bahwa nilai pagu pengadaan yang diumumkan pada aplikasi RUP sepenuhnya sesuai dengan pagu pengadaan yang ditetapkan, sehingga persentase RUP mendekati 100% dan skor IKU dapat meningkat hingga mencapai nilai maksimal.

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan pengisian data pengadaan pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen RKA-K/L dilakukan secara berkala.

10. Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal didasarkan pada Memorandum Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 889/ITJ.0/KU.120/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026 tentang Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan yang menggunakan lima dimensi penilaian, yaitu Reliability (keandalan), Assurance (jaminan), Tangibles (bukti fisik), Empathy (empati), dan Responsiveness (daya tanggap). Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kualitas layanan pengawasan sekaligus mengidentifikasi aspek yang menjadi keunggulan maupun area yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Survei dilaksanakan terhadap 16 Satuan Kerja UPT sebagai responden. Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal mencapai 4,51 dari target 4,06, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 111,08%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Jenderal telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi mitra kerja, yang tercermin dari tingginya tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 dengan periode yang sama tahun sebelumnya serta target Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,05	4,46	110,12	4,06	4,51	111,08	4,51	111,08

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 4,51 dengan capaian kinerja sebesar 111,08%, meningkat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 yang mencapai nilai 4,46 dengan capaian sebesar 110,12%.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepuasan mitra terhadap kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 4,06, realisasi sebesar 4,51 telah melampaui target yang ditetapkan sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 111,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Jenderal tetap terjaga dan mampu memenuhi ekspektasi mitra kerja.

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon I lainnya karena Indeks Kepuasan Mitra terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal merupakan indikator kinerja yang secara khusus menjadi tanggung jawab dan hanya diampu oleh Inspektorat Jenderal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. penetapan responden survei yang sesuai dengan kriteria sehingga mampu merepresentasikan persepsi mitra terhadap kualitas layanan pengawasan;
- b. pelaksanaan survei secara daring yang tetap berjalan secara efektif meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah; dan
- c. upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan pengawasan melalui penerapan prinsip profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan mitra kerja.

11. Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola Lingkup Inspektorat Jenderal

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola Lingkup Inspektorat Jenderal didasarkan pada data Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 2 Juli 2026 tentang Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola Lingkup Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah diselesaikan penyusunan 11 regulasi sesuai target yang ditetapkan, terdiri atas 1 (satu) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 4 (empat) Keputusan Inspektur Jenderal, dan 6 (enam) Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 11 dari 11

regulasi atau 100,00%, sehingga target Semester I Tahun 2026 telah tercapai sepenuhnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan regulasi dan tata kelola di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target (realisasi kinerja triwulan II 2026, realisasi triwulan II 2025 dan target tahun 2026) tersaji dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola Itjen KKP	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Persentase Penyelesaian Rancangan Regulasi dan Tata Kelola Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100,00%, sama dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyusunan regulasi dan tata kelola tetap terjaga secara konsisten serta seluruh target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 100,00%, realisasi indikator juga telah mencapai target secara penuh, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam memastikan seluruh regulasi dan dokumen tata kelola yang direncanakan dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- perencanaan penyusunan regulasi dan tata kelola yang terstruktur sesuai kebutuhan organisasi;
- koordinasi yang efektif antara Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama dengan unit kerja terkait dalam proses penyusunan dan pembahasan regulasi; dan
- pemantauan secara berkala terhadap progres penyusunan regulasi sehingga seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

12. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal didasarkan pada Memorandum Kepala Bagian Umum Nomor 964/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, pemenuhan dukungan layanan pengawasan yang diukur melalui rekapitulasi transaksi barang persediaan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah terlaksana secara optimal selama periode April sampai dengan Juni 2026. Seluruh kebutuhan barang persediaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan telah dipenuhi sesuai dengan rencana dan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100,00% sesuai dengan target 100,00%, sehingga capaian kinerja indikator ini juga sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan layanan pengawasan, khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan barang persediaan, telah berjalan secara efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 dengan periode yang sama tahun sebelumnya serta target Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan lingkup Itjen KKP	100	100	100	100	100	100	100	100

Perbandingan realisasi indikator Persentase Pemenuhan Dukungan Layanan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 dengan periode yang sama tahun sebelumnya serta target Tahun 2026 disajikan pada tabel di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100,00%, sama dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan dukungan layanan pengawasan tetap terjaga secara konsisten dan seluruh target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 100,00%, realisasi indikator telah mencapai target secara penuh sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa dukungan layanan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah tersedia secara tepat waktu dan memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- a. pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan barang persediaan secara tertib dan akurat;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data barang persediaan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan kondisi riil; dan
- c. koordinasi yang baik dalam penyediaan kebutuhan barang persediaan sehingga dukungan layanan pengawasan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.

13. Persentase Fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan didasarkan pada Memorandum Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan Nomor 917/ITJ.0/HM.540/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitas Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan tingkat implementasi Aplikasi Manajemen Sistem Pengawasan (AMS) di lingkungan Inspektorat Jenderal, yang diukur melalui persentase penyelesaian pelaporan hasil penugasan oleh seluruh unit kerja. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem informasi pengawasan sebagai sarana pengelolaan penugasan, pelaporan hasil pengawasan, serta penguatan tata kelola pengawasan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat implementasi dan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan mencapai 90,00% dari target 82,00%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 109,75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi AMS oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan secara lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan akuntabel.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2026 dengan periode yang sama tahun sebelumnya serta target Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II 2025			Triwulan II 2026			Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP	80	91,75	113,64	82	90	109,75	90	109,75

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 90,00 dengan capaian kinerja sebesar 109,75%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,00. Dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator mengalami sedikit penurunan dari 91,75 menjadi 90,00, sehingga nilai capaian kinerja turun dari 113,64% menjadi 109,75%. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak memengaruhi pencapaian target, karena realisasi tetap berada di atas target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 82,00, realisasi sebesar 90,00 telah melampaui target sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 109,75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal tetap berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi informasi.

- optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Manajemen Sistem Pengawasan (AMS) oleh seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- dukungan tenaga ahli eksternal dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi Manajemen Pengawasan; dan
- pendampingan serta pemantauan secara berkala terhadap pemanfaatan aplikasi guna meningkatkan kepatuhan unit kerja dalam menyampaikan pelaporan hasil penugasan melalui sistem.

14. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2026 karena sesuai karakteristik indikator, pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026.

2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2026, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh pagu anggaran sebesar Rp72.463.831.000,00. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah anggaran yang mengalami pemotongan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp16.151.442.000,00, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp56.312.389.000,00.

Berdasarkan data pada Aplikasi MyIntress, realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp39.583.525.000,00 atau 52,32%, dengan sisa anggaran sebesar Rp36.079.098.000,00 atau 47,68% dari total pagu anggaran. Rincian kondisi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pagu anggaran sebesar Rp72.463.831.000,00;
 2. Anggaran yang masih diblokir sebesar Rp16.151.442.000,00;
 3. Pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp56.312.389.000,00;
 4. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp39.583.525.000,00 atau 52,32%; dan
 5. Sisa anggaran sebesar Rp36.079.098.000,00 atau 47,68% dari total pagu anggaran.
- Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Semester II akan terus dilakukan, terutama terhadap kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BAB 4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,11 dengan kategori "Istimewa". Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Internal, yang ditunjukkan oleh keberhasilan sebagian besar indikator kinerja yang telah memasuki periode pengukuran mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
2. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp39.583.525.000,00 atau 52,32% dari total pagu anggaran, meskipun terdapat penyesuaian anggaran berupa pemotongan sebesar Rp16.151.442.000,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tetap berjalan sesuai rencana, dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Semester II guna mencapai target kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Seluruh indikator kinerja yang telah memasuki periode pengukuran berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penguatan koordinasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kualitas dukungan manajemen tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja hingga akhir Tahun 2026.

C. Rencana Perbaikan

Rencana perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja Sekretariat Itjen diantaranya:

1. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan.
2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai terkait dengan pelayanan prima; dan
3. Melakukan kegiatan konsolidasi internal dalam rangka pengendalian dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Tim Kerja.

LAMPIRAN

Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja Sekretariat Itjen Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tautan <https://bit.ly/4aTqbms>.